



# Penerbitan SLHS untuk MBG Diperketat

JOGJA-Badan Gizi Nasional (BGN) meminta penerbitan Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) diperketat. Dinas kesehatan (dinkes) di seluruh Indonesia tidak boleh gampang mengeluarkan SLHS.

Stefani Yulindriani  
[stefani@harianjogja.com](mailto:stefani@harianjogja.com)

Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan (Tauwas) BGN, Letjen TNI (Purn) Dadang Hendrayudha menegaskan penerbitan SLHS untuk dapur MBG perlu diperketat.

▶ Sertifikat hanya akan diterbitkan untuk dapur yang sudah memenuhi seluruh standar kesehatan, sanitasi, dan kelayakan fasilitas.

▶ Di Kota Jogja ada 42 SPGG, tetapi baru 24 SPPG yang telah beroperasi.

Menurutnya, pemeriksaan lapangan dan pemenuhan standar harus dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan keamanan pangan bagi pelajar.

▶ Halaman 10



**Petugas Satuan** Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menata makanan roti saat membuat menu Makan Bergizi Gratis (MBG) burger ayam katsu di SPPG Yayasan Kemala Bhayangkari (YKB) Polres Klaten, Jawa Tengah, Kamis (6/11).

## Penerbitan SLHS...

"Saya minta kepada dinas kesehatan agar tidak gampang mengeluarkan SLHS, karena ada prosedur yang harus dilalui. Dapurnya harus memenuhi standar, punya instalasi pengolahan air limbah [IPAL], dan unsur kebersihan lain yang sesuai aturan," ujarnya di Balai Kota Jogja pada Kamis (6/11).

Dia menyebut di Kota Jogja ada 42 SPPG. Namun hingga saat ini hanya 24 SPPG yang telah beroperasi. Dari jumlah tersebut, belum seluruh SPPG memiliki SLHS.

Dia pun meminta setiap SPPG mengurus sertifikat SLHS. Dia pun meminta Dinkes Kota Jogja mengecek secara berkala operasional dapur SPPG untuk memastikan prosedur persiapan, memasak dan penyaluran makanan sesuai dengan prosedur keamanan pangan. "Kalau ada yang belum memenuhi syarat, harus diperbaiki dulu. Begitu SLHS dikeluarkan, tidak boleh ada lagi kejadian seperti kemarin [dugaan keracunan karena MBG]," katanya.

Dia menegaskan sertifikat tersebut hanya akan diterbitkan untuk dapur yang sudah memenuhi seluruh standar kesehatan, sanitasi, dan kelayakan fasilitas. Menurutnya, penerapan SLHS menjadi bagian penting dalam pengawasan mutu dan kebersihan dapur MBG agar kasus keracunan akibat bakteri

*e-coli* tidak terulang kembali.

## Kualitas Terjaga

Sementara itu, Dadang memastikan kualitas bahan baku program MBG di Jogja tetap terjaga meski ada penyesuaian jumlah SPPG. Menurutnya, penataan ulang dilakukan agar distribusi makanan lebih efisien dan higienis, sekaligus mencegah terulangnya kasus keracunan akibat bakteri *e-coli*.

"Bahan baku kami pastikan berkualitas, karena anggaran yang disiapkan memang cukup untuk itu. Dengan bertambahnya jumlah dapur, kami lakukan pembagian agar produksi lebih seimbang dan kualitas tetap terjaga," katanya.

Dia menjelaskan penambahan jumlah dapur MBG di berbagai daerah menyesuaikan kondisi wilayah dan jarak distribusi makanan. Di wilayah padat seperti Kota Jogja, satu dapur bisa melayani hingga 3.000 penerima dalam radius sekitar satu kilometer. Namun, di daerah lain dengan sebaran penduduk yang lebih luas seperti di luar Pulau Jawa, radius distribusi dapat mencapai 16-30 kilometer.

"Kami ingin makanan bergizi ini tetap sampai ke anak-anak dalam kondisi baik. Jangan sampai karena jarak pengantaran terlalu jauh, makanan jadi tidak layak

konsumsi. Itu sebabnya peta geospasial jadi penting, untuk memastikan waktu pengantaran tidak melebihi batas aman," katanya.

Dia menegaskan BGN telah memiliki pedoman pembatasan jumlah dapur berdasarkan wilayah agar kualitas produksi dan pengawasan lebih mudah. "Misalnya satu kecamatan penerimanya sekian ribu, cukup tiga dapur saja. Kalau pun lebih, harus ada pertimbangan khusus, seperti kepadatan wilayah atau jarak antar penerima yang terlalu jauh," katanya.

## MBG Lansia

Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyebut pemerintah berencana memperluas cakupan program MBG agar tidak hanya menasar anak-anak sekolah, tetapi juga kelompok lansia dan penyandang disabilitas. Program ini merupakan bagian dari kebijakan transformasi sosial yang ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas (ratas) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (4/11) malam.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyampaikan, usulan tersebut telah disampaikan kepada Presiden dan kini tengah dalam tahap pendalaman untuk penyempurnaan teknis pelaksanaannya. (JIBI/Bisnis.com)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005